



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Maret 2020

Halaman: 2

DAK Terhenti, Proyek Fisik Tertunda

UMBULHARJO (MERAPI) - Beberapa proyek fisik dan pengadaan barang di Kota Yogyakarta yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tertunda. Pasalnya pemerintah menghentikan sementara penggunaan DAK itu karena difokuskan untuk penanganan Covid-19.

"Pembangunan Pasar Kluwih dan pengadaan barang di UPT Metrologi legal ditunda karena DAK dari pemerintah pusat dihentikan. Informasi dari surat edaran pemerintah pusat DAK untuk penanganan Covid-19," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Yudianto Dwisutono, Senin (30/3).

Dia menjelaskan tahun ini rencananya pembangunan Pasar Kluwih menggunakan anggaran DAK sekitar Rp 3 miliar. Rencana pembangunan pasar itu sudah

memasuki tahap sosialisasi di masyarakat sekitar dan siap diproses ke bagian lelang pengadaan. Sedangkan di UPT Metrologi Legal ada pengadaan barang senilai sekitar Rp 800 juta memakai DAK pemerintah pusat.

"Dengan penundaan ini, kami akan sosialisasi kembali ke pedagang Pasar Kluwih dan masyarakat sekitar. Itu kebijakan pemerintah pusat, sehingga kami mengikuti," tambahnya.

Sedangkan di Bagian Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta ada 4 paket pekerjaan pemeliharaan jalan berkala yang terdampak penghentian DAK. Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menyampaikan, empat paket proyek

pemeliharaan jalan berkala itu rencananya memakai DAK sekitar Rp 15 miliar.

"Pekerjaan pemeliharaan jalan berkala yang terdampak penghentian DAK ada di Jalan Nitikan, Lowanu, Ki Penjawi dan Cik Di Tiro. Tahapan sudah diproses ke bagian lelang pengadaan tapi masih pembahasan, sehingga akan dibatalkan," jelas Umi.

Secara terpisah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiymoko mengatakan, Kota Yogyakarta akan mendapat DAK dari pemerintah pusat dengan total mencapai sekitar Rp 161 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2020. Dengan kondisi itu pihaknya meminta Pemkot Yogyakarta segera menyikapinya karena DAK itu cukup besar. (Tri)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005